

KLIPING BERITA MEDIA MASSA

--



BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

KATA PENGANTAR

Kliping Media Massa adalah kumpulan guntingan berita yang kami sajikan secara rutin. Guntingan berita ini kami seleksi dari berita yang muncul di media cetak. Adapun tema berita yang kami pilih adalah berita yang berkaitan dengan organisasi dan substansi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan yang berkaitan dengannya.

Kami berharap klipping ini bermanfaat untuk monitoring media BPIW.

Hormat kami

Tim penyusun

DAFTAR ISI

No	Media	Tanggal	News Title	Resume
1	Bisnis Indonesia, Hal. 20	Kamis, 10 Januari 2020	PUPR Sediakan Pembiayaan Syariah MBR	Untuk menghindari modus penipuan perumahan berbasis syariah, Kementerian PUPR kini mempersiapkan alternative pembiayaan KPR berbasis syariah
2	Bisnis Indonesia, Hal. 20	Kamis, 10 Januari 2020	Pengamanan Pesisir Pantura Jadi Prioritas	Pemerintah menetapkan proyek pesisir di pantai utara Jawa
3	Kompas, Hal 16	Kamis, 10 Januari 2020	Jalingkut Brebes-Tegal Kejar Mudik Lebaran	Pembangunan jalan lingkar utara Brebes-Tegal kembali dilanjutkan
4	Kompas, Hal 7	Kamis, 10 Januari 2020	Pengendalian Bencana Dievaluasi	Presiden mengintruksikan semua pihak mengevaluasi total sistem pengendalian bencana di Jabodetabek
5	Kompas, Hal 7	Kamis, 10 Januari 2020	Opini	Naturalisasi dan Normalisasi
6	Koran Tempo, Hal. 3	Kamis, 10 Januari 2020	Ogah Rugi di Ciawi dan Sukamahi	Pembebasan lahan dua waduk pengendali banjir di puncakterganjal harga tanah yang melambung tinggi
7	Koran Tempo, Hal. 4	Kamis, 10 Januari 2020	Mengebut Pembendung Banjir di Selatan Jakarta	Bendungan Ciawi dan Sukamahi ditargetkan rampung Desember mendatang
8	Koran Tempo, Hal. 6	Kamis, 10 Januari 2020	Bekasi Dapat Rp 4 Triliun untuk Benahi Kali	Untuk restorasi kali di Kota Bekasi
9	Bisnis Indonesia, Hal. 6	Jumat, 11 Januari 2020	Kala Dewa Indra Turun ke Ibu Kota	Musibah banjir melanda Jakarta
10	Kompas, Hal 13	Jumat, 11 Januari 2020	Permintaan Lahan Diprediksi Naik	Permintaan lahan untuk industry pada 2020 diperkirakan akan meningkat naik
11	Media Indonesia, Hal 7	Jumat, 11 Januari 2020	Anies Dukung Program Normalisasi	Untuk mengantisipasi banjir di Kota Jakarta
12	Media Indonesia, Hal 8	Jumat, 11 Januari 2020	Warga Natuna Ingin Infrastruktur Andal	Pengembangan infrastruktur di kawasan Natuna dinilai perlu untuk digiatkan

Judul	PUPR Sediakan Pembiayaan Syariah MBR	Tanggal	Kamis, 10 Januari 2020
Media	Bisnis Indonesia, Hal. 20		
Resume	Untuk menghindari modus penipuan perumahan berbasis syariah, Kementerian PUPR kini mempersiapkan alternative pembiayaan KPR berbasis syariah		

► PENIPUAN PROPERTI

PUPR Sediakan Pembiayaan Syariah MBR

Bisnis, JAKARTA — Sebagai upaya menghindari modus penipuan perumahan berbasis syariah yang belakangan marak terjadi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah mempersiapkan alternatif pilihan pembiayaan KPR berbasis syariah yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian PUPR Arief Sabaruddin mengatakan maraknya kasus penipuan perumahan berbasis syariah seharusnya tidak pernah terjadi jika masyarakat menyadari bahwa pemerintah selama ini telah menyediakan alternatif pembiayaan perumahan berbasis syariah.

“Masyarakat dihimbau untuk lebih berhati-hati, jeli dan cermat menyikapi iming-iming yang ditawarkan pengembang. Sebelum membeli, masyarakat perlu untuk memeriksa kredibilitas pengembang yang menawarkan rumah tersebut dan memastikan pengembang tersebut telah terdaftar di Sistem Registrasi Pengembang (Sireng) yang telah disediakan pemerintah,” ujarnya, Rabu (8/1).

Melalui sistem tersebut, imbuhnya, masyarakat bisa mengecek nama-nama pengembang yang telah terdaftar secara resmi. Dia menuturkan bahwa pengembang yang telah terdaftar pada sistem tersebut telah diseleksi oleh asosiasi tempat pengembang tersebut bernaung.

Arief mengatakan demikian menanggapi maraknya penipuan properti berkedok syariah, seperti PT Wepro Citra Sentosa yang diduga melakukan penipuan perumahan syariah terhadap 3.680 orang yang tersebar di beberapa wilayah. Juga PT Cahaya Mentari Pratama yang menawarkan proyek Multazam Ismalic Residence di Surabaya.

Arief mengungkapkan Kementerian PUPR melalui PPDPP sejak tahun 2010 telah mengelola dan menyalurkan dana pembiayaan perumahan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

PPDPP telah bekerja sama dengan 37 bank pelaksana untuk menyalurkan FLPP yang terdiri

dari 10 bank nasional dan 27 Bank Pembangunan Daerah (BPD) baik yang konvensional maupun syariah.

Adapun, 15 bank pelaksana syariah, yaitu Bank BTN Syariah, Bank BNI Syariah, Bank BJB Syariah, Bank Sumut Syariah, Bank Jambi Syariah, Bank NTB Syariah, Bank Sulselbar Syariah, Bank Sumsel Babel Syariah, Bank Jatim Syariah, Bank Aceh Syariah, Bank Nagari Syariah, Bank Kalsel Syariah, Bank Riau Kepri Syariah, dan Bank Jateng Syariah.

“Skema pembiayaan syariah disediakan melalui bank pelaksana, sedangkan pihak pelaku pembangunan atau pengembang hanya memastikan rumah yang dibangun sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah,” jelasnya.

Arief menyatakan daftar bank syariah yang bekerjasama juga tercantum dalam Aplikasi Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan (SiKasep) bersama dengan Bank konvensional penyalur FLPP lainnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Rolas Budiman Sitinjak mengatakan terungkapnya beberapa kasus penipuan properti syariah yang bakal makin menambah daftar panjang persoalan yang terjadi di sektor properti.

Selama ini, pengaduan ataupun laporan yang masuk ke BPKN memang didominasi oleh sektor properti. Dia menyebutkan sekitar 90% pengaduan yang disampaikan BPKN berkaitan dengan persoalan properti.

“Sebagian persoalan yang diajukan itu mengenai kepemilikan atau sertifikat. Jadi, banyak yang dokumen kepemilikannya belum jelas tetapi sudah ditransaksikan ke konsumen,” ujarnya kepada *Bisnis*.

Agar terhindar dari modus penipuan properti berkedok syariah, Rolas pun mengimbau agar masyarakat dapat memaksimalkan hak-haknya untuk mendapatkan informasi yang lengkap mengenai legalitas dari pengembang properti terkait, status proyeknya, dan informasi-informasi terkait lainnya.

(Fitri Sartina Dewi)

Judul	Pengamanan Pesisir Pantura Jadi Prioritas	Tanggal	Kamis, 10 Januari 2020
Media	Bisnis Indonesia, Hal. 20		
Resume	Pemerintah menetapkan proyek pesisir di pantai utara Jawa		

► RISIKO BENCANA

Pengamanan Pesisir Pantura Jadi Prioritas

Bisnis, JAKARTA — Pemerintah menetapkan proyek pengamanan pesisir di pantai utara Jawa atau Pantura sebagai prioritas pembangunan hingga 2024. Pengamanan diperlukan karena wilayah pesisir Pantura rentan terhadap risiko kehilangan lahan yang disebabkan beragam faktor.

Dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020-2024, pengamanan pesisir Pantura mencakup lima wilayah perkotaan, yaitu DKI Jakarta, Semarang, Pekalongan, Demak, dan Cirebon. Dokumen yang dikutip *Bisnis*, Rabu (8/1) menunjukkan, ada 41 proyek prioritas yang dinilai memiliki nilai strategis dan daya ungkit tinggi untuk mencapai sasaran prioritas

pembangunan.

Secara umum, pengamanan pesisir di lima perkotaan di Pantura bertujuan untuk mengatasi bencana banjir rob. Di samping itu, proyek juga diharapkan bisa menurunkan waktu tempuh Semarang–Demak dari 60 menit menjadi 25 menit. Secara keseluruhan, diperlukan anggaran sebanyak Rp50,8 triliun untuk mengamankan pesisir Pantura dari risiko bencana.

Kebutuhan dana itu sebagian besar disumbang dari anggaran negara sebanyak Rp40,4 triliun atau 80%. Sedangkan sisanya dari pos dana alokasi khusus sebesar Rp2,8 triliun dan kerja sama dengan badan usaha sebanyak Rp10,4 triliun.

Terkait pengamanan Semarang, Kementerian PUPR

melansir konstruksi dua proyek telah selesai dan siap beroperasi yakni Bendung Gerak di Kanal Banjir Barat (KBB), dan pengendali banjir rob untuk Kota Semarang.

Dalam catatan *Bisnis*, salah satu proyek KPBU yang sudah berjalan adalah proyek jalan tol Semarang–Demak. Proyek jalan bebas hambatan ini terpadu dengan pembangunan tanggul laut. PT PP Semarang Demak menjadi pemenang lelang pengusahaan yang akan membangun jalan plus tanggul sepanjang 16,3 kilometer. Adapun, 10,7 kilometer sisanya dibangun oleh pemerintah.

Untuk diketahui, Pantura merupakan tulang punggung ekonomi nasional dengan kontribusi 20% terhadap

produk domestik bruto (PDB). Di beberapa titik, kawasan Pantura menghadapi kerentanan terhadap tren kenaikan muka air laut dan penurunan muka tanah. Di Demak misalnya, abrasi telah menyapakan lahan seluas 476 hektare.

Peneliti Utama Badan Penelitian & Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (PUPR) Dede Manarol Huda Sulaiman mengatakan luas-an abrasi yang teridentifikasi di Pantura mencapai 5.500 hektare, tersebar di sepuluh kabupaten/kota.

Untuk mengatasi risiko tersebut, Dede telah memperkenalkan teknologi pemecah gelombang ambang rendah atau pegar untuk mengatasi abrasi. *(Rivki Maulana)*

Judul	Jalinkut Brebes-Tegal Kejar Mudik Lebaran	Tanggal	Kamis, 10 Januari 2020
Media	Kompas, Hal 16		
Resume	Pembangunan jalan lingkut utara Brebes-Tegal kembali dilanjutkan		

INFRASTRUKTUR JALAN

Jalinkut Brebes-Tegal Kejar Mudik Lebaran

TEGAL, KOMPAS — Sempat dihentikan tahun 2013, pembangunan jalan lingkut utara atau jalinkut penghubung Kabupaten Brebes dan Kota Tegal, Jawa Tengah, dilanjutkan. Jalinkut Brebes-Kota Tegal ini ditargetkan bisa dilintasi saat mudik Lebaran, Mei 2020.

Proyek pembangunan jalinkut sepanjang 17,4 kilometer dimulai tahun 2010. Seharusnya, jalan itu bisa dilintasi tahun 2014. Namun, tahun 2013, kontraktor pelaksana pembangunan PT Bumirejo atau PT Brantas Abipraya menangguk pekerjaan karena belum mendapat pembayaran termin bulanan sejak Oktober hingga Desember 2012. Pembayaran termin yang belum dibayarkan kala itu Rp 16 miliar.

Juli 2019, di Brebes, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengungkapkan keinginannya meminjam jalinkut yang masih menjadi barang bukti dalam kasus hukum. Basuki berharap, pembangunan bisa tetap berlanjut seiring proses hukum.

"Pembangunan lanjutan sudah kami mulai awal Januari 2020 dan targetnya selesai Desember 2020. Meski begitu, pada saat mudik Lebaran atau Mei mendatang, jalinkut Brebes-Kota Tegal diharapkan sudah bisa digunakan fungsional," kata Pejabat Pembuat Komitmen Bina Marga Wilayah 1 Jawa Tengah Yudi Harto Suseno, Rabu (8/1/2020) di Kota Tegal.

Menurut Yudi, dari panjang total jalinkut 17,4 km, baru sekitar 3 kilometer yang dikerjakan hingga tahun 2013. Artinya, Bina Marga masih memiliki pekerjaan rumah melanjutkan sekitar 14 km lagi. Proyek itu menyerap anggaran Rp 200 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Yudi mengklaim, tidak ada kendala apa pun dalam pembangunan jalinkut. Ia optimis pembangunan selesai sebelum tenggat yang ditentukan.

Hingga Rabu petang, proyek jalinkut di Kota Tegal digunakan beberapa orang untuk berlatih balapan. Beberapa truk pengangkut pasir dan batu juga lalu lalang di sekitar lokasi.

Pemandangan itu kontras dengan pemandangan di tempat serupa, Juni 2019. Kala itu, masyarakat sekitar memanfaatkan jalinkut yang mangkrak untuk menjemur udang rebon.

Secara terpisah, Wakil Bupati Brebes Narjo berharap jalinkut Brebes-Kota Tegal bisa segera diselesaikan dan difungsikan saat arus mudik Lebaran 2020. Jalinkut sangat diperlukan untuk memecah arus kendaraan di jalan pantai utara Jawa.

"Saat jalinkut beroperasi, kendaraan besar tidak boleh lewat jalur dalam kota sehingga potensi kemacetan di jalan dalam kota di Brebes dan Kota Tegal bisa ditekan," ujarnya.

Adapun Wali Kota Tegal Dedy Yon Suproyono menuturkan, selain memberi kenyamanan bagi para pengguna jalan, pembangunan jalinkut Brebes-Kota Tegal akan membawa dampak positif bagi perekonomian masyarakat. Peluang-peluang ekonomi baru akan muncul.

"Jika ada jalan baru, minimal akan ada usaha-usaha, seperti, warung, restoran, dan bengkel," ujar Dedy.

Ia menambahkan, peluang investasi juga timbul seiring dengan beroperasinya jalinkut. Sebab, kemudahan akses antardaerah merupakan salah satu hal yang dipertimbangkan oleh investor. (XTI)

Saat jalinkut beroperasi, kendaraan besar tidak boleh lewat jalur dalam kota sehingga potensi kemacetan di jalan dalam kota di Brebes dan Kota Tegal bisa ditekan.

Judul	Pengendalian Bencana Dievaluasi	Tanggal	Kamis, 10 Januari 2020
Media	Kompas, Hal 7		
Resume	Presiden mengintruksikan semua pihak mengevaluasi total sistem pengendalian bencana di Jabodetabek		

Pengendalian Bencana Dievaluasi

Presiden Joko Widodo menginstruksikan semua pihak mengevaluasi total sistem pengendalian bencana di Jabodetabek dan Lebak. Rencana induk pengendalian banjir juga perlu dijalankan guna mencegah bencana terulang di masa mendatang.

JAKARTA, KOMPAS — Banjir bandang dan tanah longsor di Jabodetabek dan Lebak sepekan terakhir menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah. Perbaikan lingkungan harus dikerjakan di hulu hingga hilir.

"Saya mengajak kita semua mengevaluasi total sistem pengendalian banjir, pengendalian bencana dari hulu sampai hilir, sehingga betul-betul memiliki strategi besar jangka pendek, menengah, dan panjang," kata Presiden Joko Widodo saat menyampaikan pengantar rapat khusus membahas pengendalian banjir di DKI Jakarta dan daerah penyangga, Rabu (8/1/2020), di Istana Merdeka, Jakarta.

Rapat dihadiri Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Banten Wahidin Halim, sejumlah bupati dan wali kota, serta menteri dan kepala badan terkait.

Presiden Jokowi menjelaskan, rencana induk pengendalian banjir ibu kota negara dan daerah sekitar sudah ada sejak lama. Hanya saja, rencana besar itu belum sepenuhnya diimplementasikan. Diperlukan kerja sama pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota untuk melaksanakan rencana induk pengendalian bencana.

Presiden juga memerintahkan jajarannya untuk merehabilitasi hutan dan lahan dengan reboisasi. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diminta menyiapkan bibit tanaman pencegah longsor dan

penghambat banjir bandang untuk reboisasi pada bulan Januari-Februari ini.

Untuk menampung dan menahan laju air di hulu, Presiden meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempercepat pembangunan bendungan Ciawi dan Sukamahi di Kabupaten Bogor.

Untuk mengendalikan banjir di hilir, khususnya Jakarta, Presiden meminta sodetan Sungai Ciliwung selesai tahun ini juga. Gubernur Anies diminta segera menyelesaikan pembebasan lahan yang selama ini menghambat pembangunan sodetan.

Program normalisasi atau naturalisasi sungai-sungai di Jakarta juga perlu segera dituntaskan.

Seusai rapat, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menegaskan, pembangunan sodetan Ciliwung menuju Kanal Timur bisa diselesaikan tahun ini. Untuk memperlancar pembangunan, Gubernur Anies mencabut upaya hukum dan bermusyawarah dengan masyarakat terkait pembebasan lahan. "Dari 1.200 meter sodetan, baru 600 meter yang terbangun. Mudah-mudahan bisa diselesaikan tanahnya sehingga sisa 600 meter bisa tidak sampai setahun diselesaikan," ujarnya.

Selain itu, pemerintah pusat dan DKI juga sepakat menyelesaikan normalisasi dan naturalisasi 14 sungai di Jakarta.

Tutup tambang ilegal

Terkait kerusakan hutan akibat penebangan liar dan pe-

nambahan emas ilegal di Taman Nasional Halimun-Salak dan sekitarnya, Gubernur Wahidin mengatakan, Pemprov Banten tidak memiliki kewenangan menertibkan tambang liar. "Penegakan hukum menjadi tanggung jawab Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan," katanya seusai rapat.

Pemerintah juga berencana merelokasi warga di lokasi rawan bencana. Wahidin meminta Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya mencari lokasi yang aman untuk relokasi warga. Bupati Bogor Ade Yasin pun mencari lahan untuk relokasi warga, terutama warga Sukajaya.

Jakarta bersiap

Terkait prediksi hujan sedang hingga lebat serta pasang naik air laut di Teluk Jakarta, 9-12 Januari 2020, Pemerintah Provinsi DKI melakukan persiapan, antara lain menyiagakan pompa dan penyiapan pos-pos hingga kelurahan.

Anies mengatakan, pompa bergerak (*mobile*) disiapkan di sekitar pesisir untuk membantu mengalirkan air saat rob.

Untuk antisipasi hujan, ujar Anies, dibangun pos-pos sampai di level kelurahan untuk merespons jika terjadi genangan.

Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Juaini Yusuf mengatakan, saat banjir awal Januari lalu, seluruh pompa, yakni 474 pompa stasioner dan 122 pompa bergerak, berfungsi. Akan tetapi, beberapa pompa terpaksa dimatikan karena terendam air banjir, di antaranya di Teluk

Gong dan Semanan. Selain pompa yang dimatikan karena terendam, Semanan juga merupakan cekungan. Pompa bergerak digunakan di sana untuk menyurutkan air.

Menurut Juaini, guna mencegah pompa terendam, ke depan akan dikaji untuk meningkatkan lokasi pompa.

Kepala Pusat Data dan Informasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta M Ridwan mengatakan, pantauan tinggi muka air di pintu air setiap tiga jam diinformasikan kepada masyarakat sebagai peringatan dini.

Sementara itu, pengangkutan sampah sisa banjir terus dilakukan Dinas Lingkungan Hidup DKI. "Semua sedang ditangani, dengan jumlah terbanyak di Jakarta Barat," kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Andono Warih.

Dalam keterangan pers, Tubagus Soleh Ahmadi, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) DKI Jakarta, mengatakan, kebijakan naturalisasi yang dikeluarkan Gubernur Anies tak menyebutkan secara detail di mana saja lokasi yang akan dikerjakan.

Tubagus juga menyoroti Peraturan Gubernur Nomor 143 Tahun 2015 tentang Rencana Pengendalian Bencana yang setidaknya ada kajian pemerintah tentang wilayah bencana dan cara penanganan bencana. Jika peraturan gubernur itu dikerjakan dengan benar, setidaknya bencana bisa diminimalisasi.

(IRE/HLN/NTA/GIO)

Judul	Opini	Tanggal	Kamis, 10 Januari 2020
Media	Kompas, Hal 7		
Resume	Naturalisasi dan Normalisasi		

Naturalisasi dan Normalisasi

Sunjoto

Dosen Fakultas Teknik UGM, Penerima Kalpataru 1995, Pembina Lingkungan Bidang Konservasi Air

Naturalisasi dan normalisasi adalah suatu metode *engineering* yang masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan.

Selain itu, terkait dengan normalisasi dan naturalisasi ini, sebenarnya bukan hanya masalah bagaimana menangani sungai saja, tetapi dalam implementasi metode tersebut juga melibatkan sungai yang harus dikelola (*managed*).

Naturalisasi

Naturalisasi dalam masalah banjir adalah suatu cara menyelesaikan genangan akibat kelebihan air hujan yang jatuh dengan cara meresapkannya pada suatu daerah, seperti zaman ketika suatu wilayah itu masih alami rapat vegetasi, sedikit rumah, dan bangunan lain sehingga air hujan sebesar-besarnya dapat meresap dengan sendirinya ke dalam tanah. Namun, karena saat ini *vegetation cover* telah musnah akibat adanya pembangunan, seperti gedung dan jalan, yang menghambat infiltrasi air hujan ke dalam tanah, air hujan sebagian besar menjadi *runoff* atau aliran permukaan penyebab banjir.

Pada keadaan seperti ini, diusahakan tetap terjadi infiltrasi yang sebesar-besarnya dengan bantuan teknologi, misalnya menggunakan *recharge system* yang berupa *recharge well* (sumur resapan), *recharge trench* (parit resapan) dan *recharge yard* (halaman peresapan) atau pun waduk, embung, telaga situ, dan *retarding basin* lain.

Metode ini sering disebut Teknik Drainase Berwawasan Lingkungan yang mulai dapat perhatian besar sejak 1970-an ketika semangat keberlanjutan (*sustainability*) berkembang, imbas dari telah diadakannya United Nation Conference on

the Human Environment di Stockholm, Swedia, 5-16 Juni 1972, yang diikuti 113 negara, termasuk Indonesia. Tanggal 5 Juni kemudian menjadi Hari Lingkungan Hidup Sedunia.

Secara konsep, nenek moyang telah mengisyaratkan perlunya konservasi air dengan menggunakan banyak metode, antara lain pemredikan penamaan air yang prestisius, seperti *amrtanjiwani* atau air kehidupan, budaya yang dikaitkan dengan pelestarian air, misalnya mandi sebelum ijab kabul dari tujuh mata air, penamaan daerah dengan nama air, seperti Cibeureum (air merah), dan juga pemali, seperti celaka menimbun sumur.

Bahkan, ayat suci pun (Al Quran) menempatkan air dalam posisi penggambaran surga, begitu juga ritual agama Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha, semua menggunakan air dan ini semua karena kesadaran '*No living thing exists without water*' (tiada kehidupan tanpa air).

Kelebihan metode ini, selain menyelesaikan masalah banjir, juga akan meresapkan *runoff* atau aliran permukaan menjadi *groundwater storage* atau tampungan air hujan. Kekurangan metode ini bahwa akan berhasil jika semua daerah aliran sungai (DAS) dikelola semuanya. Sementara untuk kasus DKI Jakarta, sebagian DAS-nya berada di Provinsi Jawa Barat dan menyumbang debit yang signifikan pada Sungai Ciliwung yang melalui wilayah DKI Jakarta.

Selain itu, apabila akan menerapkan metode ini, selain membuat *retarding basin* di semua DAS, juga harus konsekuen dihitung setiap rumah dengan luas atap yang berbeda harus mempunyai *recharge systems* yang berbeda juga dimensinya.

Saluran drainase yang kedap air perlu dibuat porus pada bagian dasarnya, kemudian taman juga harus berwawasan lingkungan karena hampir semua taman di DKI, bahkan seluruh Indonesia, sangat jarang yang berasaskan konservasi air, yaitu yang seharusnya permukaan



taman cekung ke bawah bukan cembung ke atas sehingga bila hujan turun dapat berfungsi sebagai daerah resapan.

Normalisasi

Sementara metode normalisasi, untuk masalah banjir adalah suatu cara yang lain lagi walau punya tujuan sama, yaitu mencegah genangan dengan cara secepatnya kelebihan air dialirkan lewat jaringan saluran drainase, kemudian ke sungai, dan selanjutnya mengalir ke laut. Fokus metode ini adalah menghitung luas tampang jaringan dengan parameter debit air dan kecepatan aliran yang dipengaruhi banyak faktor, seperti kemiringan, kekasaran dinding, dan radius hidrolis saluran.

Metode ini sudah berkembang sejak zaman peradaban dimulai dan didukung formula perhitungan sudah sejak muncul ahli-ahli hidrolika dan hidrologi pada era renaissance, dan selanjutnya dalam keilmuan, cara ini umum disebut Teknik Drainase Perkotaan (*Urban Drainage Engineering*).

Kelebihan metode ini adalah kecepatan menyelesaikan masalah banjir dengan segera karena dengan mengelola, termasuk memperbesar dimensi sungai, maka akan dapat mengalirkan seluruh air hujan dengan segala cara, seperti dengan polder dan pompa, misalnya di Belanda, sehingga limpasannya tidak menggenang menjadi banjir. Kekurangannya adalah aliran akan terganggu apabila terjadi pendangkalan sungai dan saluran serta tak ada unsur konservasi guna menambah ca-

dangan air tanah.

Manfaat konservasi untuk wilayah pantai tidak saja menjaga *water balance*, tetapi juga mencegah intrusi air laut yang saat ini sudah mencapai kawasan Monas. Di negara-negara subtropis, *recharge systems* tak terlalu populer mengingat curah hujannya kecil—biasanya di bawah 600 mm per tahun, di Indonesia sekitar 2.500 mm per tahun—dan juga hujan berbentuk salju, yang begitu jatuh tak langsung mengalir, tetapi menunggu panas matahari dulu hingga persentase infiltrasinya besar.

Dalam bidang *engineering*, untuk mendapatkan hasil yang efisien dan efektif, lazim tidak haram ditempuh dengan cara *hybrid solution*, yang artinya bahwa beberapa metode digabungkan sesuai dengan kondisi yang biasanya tergantung dari sudut pandang keadaan alam, seperti sifat hujan, karakter geologi batuan, sifat tanah, potensi longsor, keadaan sungai, meliputi dimensi, tipe, kemiringan, posisi sungai terhadap muka air laut, pasang surut, luas genangan, topografi, dan batimetri.

Selain itu, juga bangunan yang telah ada, seperti jembatan, turap, gorong-gorong, jaringan saluran drainase, dan jumlah *recharge systems*. Lalu, dari sudut pandang sosial ekonomi menyangkut perilaku, kebiasaan mengelola sampah, dan pendapatan penduduk, serta dari segi lingkungan, terutama *water balance* di daerah itu.

Jadi, sebenarnya tak ada lagi polemik naturalisasi versus normalisasi, yang ada adalah bagaimana membebaskan DKI dari banjir dan suatu saat tak kekurangan air karena kelalaian para *engineer*. Penulis yakin, nanti dalam implementasinya, metode apa pun, naturalisasi atau normalisasi, pada hakikatnya di dalamnya pasti ada bagian atau serpihan metode lain, sehingga tak sekali pun kedua metode itu pernah dan akan bertentangan antara satu dan lainnya.

Judul	Ogah Rugi di Ciawi dan Sukamahi	Tanggal	Kamis, 10 Januari 2020
Media	Koran Tempo, Hal. 3		
Resume	Pembebasan lahan dua waduk pengendali banjir di puncak terganjal oleh harga tanah yang melambung tinggi		

METRO

Ogah Rugi di Ciawi dan Sukamahi

Pembebasan lahan dua waduk pengendali banjir di Puncak terganjal oleh harga tanah.

EDISI, 9 JANUARI 2020



Pembangunan proyek Bendungan Ciawi dan Sukamahi di Ciawi, Bogor, Jawa Barat, Desember 2019.

BOGOR - Baru kali ini konsultan politik Denny JA. menjadi korban pengusiran. Vilanya di Megamendung, Puncak, Jawa Barat, terlibas oleh pembangunan Bendungan Ciawi dan Sukamahi. Tidak semuanya, memang. Dari total 5 hektare lahan, hanya 1,5 hektare yang kena gusur. Itu pun cuma berupa tanah kosong dan tidak menyentuh rumah peristirahatan yang dia gunakan untuk memalis sejumlah buku serta merenungkan strategi pemenangan pemilihan presiden tersebut.

Meski terkena pembongkaran, Denny Januar Ali-nama lengkap sang konsultan-malah girang. Alasannya ada dua. Pertama, ikut berkontribusi dalam penanganan banjir Jakarta, sesuai dengan fungsi dua waduk tersebut. Kedua, dibayar mahal. Dokter perbandingan politik dan bisnis dari Ohio University, Amerika Serikat, ini menyebutkan pemerintah menyodorkan ganti rugi hingga dua kali nilai jual obyek pajak. "Tatilahnya bukan ganti rugi, melainkan ganti untung," ujarnya kepada Tempo, kemarin.

Bendungan Ciawi dan Sukamahi mengubah wajah kawasan Puncak. Ratusan keluarga dari enam desa di Kecamatan Megamendung dan Cisarua diminta hijrah, termasuk sejumlah vila. Kebun dan pohon ikut rata dengan tanah.

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane Bambang Hidayah mengatakan pembebasan tanah sudah lebih dari 80 persen. "Harga ganti rugi bervariasi berdasarkan perhitungan tim pemer," katanya.

Camat Megamendung Endi Rismawan mengatakan lokasi dua waduk tersebut dulunya terdiri atas permukiman dan kebun. Warga yang sudah menerima uang kompensasi meninggalkan kampung mereka dan mencari tempat tinggal baru. "Sejauh ini tidak ada masalah pembebasan lahan," ucapnya.

Kendala baru muncul belakangan, saat lahan yang belum terbebaskan tersisa 9,2 persen. Menurut dia, pemerintah pusat tidak kunjung mencairkan dana. "Kami menunggu kapan pusat mau membebaskan sisa lahan," kata Endi.

Berdasarkan informasi yang diperoleh Tempo, pembebasan lahan terganjal oleh tingginya harga yang diajukan warga. Bahkan ada yang meminta ganti rugi hingga tiga kali lipat nilai jual obyek pajak. Artinya, melebihi nilai pasar tanah di Megamendung yang dibanderol Rp 500 ribu hingga Rp 1 juta per meter persegi untuk tanah yang berlingkungan dengan jalan.

Kepala Desa Sukamahi Budi Mamat menilai wajar tuntutan tersebut. Alasannya, warga yang tergusur harus kembali membeli tanah plus membangun rumah baru di lokasi lain. Ia memcontohkan, warga yang mendapat kompensasi Rp 500 ribu per meter harus menambak banyak jika tetap ingin tinggal di kawasan Puncak. "Apalagi ke atas (arah timur Jalur Puncak), harga per meter sudah tembus Rp 3 juta," kata dia kepada Tempo di kantornya.

juta," kata dia kepada Tempo di kantornya.

Ada juga kendala adat di lokasi yang jauh dari akses jalan dan telah dimiliki sekelompok warga secara turun-temurun. "Karena lahan-lahan itu bisa dikatakan sebagai tanah adat," ucap Budi. Petugas desa, dia melanjutkan, telah memberikan rekomendasi tempat tinggal baru agar warga tergerak untuk pindah. "Tapi mau atau tidaknya, kami kembalikan kepada warga," tuturnya. Di Desa Sukamahi terdapat 47 bidang rumah bersertifikat yang tergusur.

Budi mengatakan pemerintah desa merayu warga untuk merelakan tanahnya dengan iming-iming diikutsertakan dalam pengembangan pariwisata di Bendungan Ciawi dan Sukamahi. "Nantinya waduk itu jadi tempat wisata baru di Puncak. Jadi, saya libatkan warga yang tergusur untuk jadi pengelola di bawah badan usaha milik desa kami," kata dia.

Nurhadi, 48 tahun, ogah melepas tanah warisannya di Desa Sukamahi karena khawatir ada perbedaan perhitungan luas. Dia menyebutkan tetangganya memiliki 100 meter persegi, tapi hanya diganti 90 meter persegi. "Harus adil, dong. Kami rela digusur. Masak, ganti ruginya tidak sesuai?" ujar warga Desa Cipayung, Megamendung tersebut.



■ WISATA PUNCAK (2016)

Judul	Mengebut Pembendung Banjir di Selatan Jakarta	Tanggal	Kamis, 10 Januari 2020
Media	Koran Tempo, Hal. 4		
Resume	Bendungan Ciawi dan Sukamahi ditargetkan rampung Desember mendatang		

METRO

Mengebut Pembendung Banjir di Selatan Jakarta

Ditargetkan rampung Desember mendatang, Bendungan Ciawi dan Sukamahi di Puncak, Jawa Barat, masih menyisakan lebih dari separuh pekerjaan.

EDISI, 9 JANUARI 2020



Proyek Bendungan Ciawi dan Sukamahi di Ciawi, Bogor, Jawa Barat, Selasa lalu.

BOGOR - Sulit membayangkan ada lahan kosong dengan luas lebih dari 40 hektare di Puncak, Jawa Barat, yang kian padat. Lokasinya pun super-strategis, cuma sekitar 1-2 kilometer dari Jalan Raya Puncak-Gadog Kilometer 72 di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Terletak di ketinggian 1.000-an meter dari laut, suhunya adem di kisaran 17-20 Celsius.

Lahan yang membuat pengembang properti ngiler itu adalah cikal-bakal Waduk Ciawi dan Sukamahi. Kedua bendungan yang berdampingan di hulu Ciliwung tersebut merupakan bagian dari upaya pengendalian banjir Jakarta. Program pemerintah pusat ini mereduksi 30 persen aliran air ke Ibu Kota.

Pembangunannya dimulai pada 2016, setelah rencana muncul pertama kali pada 2005. Presiden Joko Widodo meminta percepatan penyelesaian proyek ini pada akhir 2020, dari target awal Mei 2021. "Karena permintaan itu, kami kebut pengerjaannya," ujar Whima Regianto, manajer proyek dari PT Brantas Abipraya kepada Tempo di lokasi, dua hari lalu. PT Brantas merupakan kontraktor Bendungan Ciawi bersama PT Sacna. Sedangkan Bendungan Sukamahi, yang lebih kecil, digarap PT Wijaya Karya dan PT Basuki Rahmanta Putra.

Whima mengatakan instruksi Presiden tersebut membuat pekerja bergerak 24 jam dalam tiga shift. Di bawah gerimis siang itu, lima backhoe dan traktor hilir-mudik di sekitar anak Sungai Ciliwung yang membelah kawasan yang telah gundul tersebut. Sepanjang mata memandang, cuma tersisa satu bangunan, yaitu masjid di puncak bukit di tepian anak Ciliwung. Pekerja menggunakannya sebagai tempat istirahat dan akan dibongkar paling akhir.

Menurut Whima, sejak percepatan berlangsung pada akhir tahun lalu, mereka dapat merampungkan 5 persen pekerjaan dalam sebulan. Dia mencontohkan, penutupan saluran air sudah hampir rampung seluruhnya sejak dikerjakan mulai 21 November 2019.

"Progres Bendungan Ciawi sudah 45 persen dan Bendungan Sukamahi 35 persen," ujar Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane Bambang Hidayah. Dia mengatakan perintah Jokowi membuat percepatan kerja sekitar 38 persen.

Pejabat pembuat komitmen Bendungan Ciawi, Geri Ramdhan, mengatakan 45 persen progres pekerjaan itu terdiri atas persiapan proyek, pembangunan bendungan utama, bangunan pelimpah, hidromekanikal, serta pembuatan fasilitas umum. Bagian pekerjaan terbesar yang telah mereka selesaikan adalah pengelakan sungai, yang mencapai 32,16 persen. Istilah teknisnya, bottom outlet.

Geri menuturkan pekerjaan awal pembuatan bendungan pada umumnya adalah pengelakan sungai. Setelah itu baru menggarap main dam atau bendung utama. "Tapi kami lakukan semua berbarengan karena mengejar target percepatan," ujar dia.

Sementara itu, 35 persen pekerjaan terselesaikan di Bendungan Sukamahi juga didominasi pengelakan sungai 30 persen. Sisanya baru dikerjakan sebagian kecil, seperti bendung utama 0,23 persen, bangunan pelimpah 0,04 persen, dan fasilitas umum 0,74 persen.

Bambang menunjuk dua faktor yang menjadi penghambat kerja mereka: cuaca buruk dan pembebasan lahan yang tersisa 9,2 persen. "Bogor kan terkenal sebagai Kota Hujan," ujarnya. Pekerja, kata dia, mengoptimalkan waktu kerja saat cuaca terang. "Insya Allah, kalau tidak ada kendala cuaca, selesai Desember mendatang."

Dengan luas genangan sekitar 39,40 hektare, Bendungan Ciawi akan memiliki daya tampung hingga 6,05 juta meter kubik. Sedangkan Bendungan Sukamahi seluas 5,23 hektare dengan volume tampung 1,68 juta meter kubik.

Bambang mengatakan Bendungan Ciawi dan Sukamahi dapat mereduksi potensi banjir Jakarta. Waduk bersaudara itu menahan air dari Gunung Gede dan Pangrango sebelum mencapai Bendung Katulampa di Bogor, yang menjadi pintu masuk air lewat Ciliwung ke Jakarta. Prediksinya, dia melanjutkan, Ciawi-Sukamahi dapat menekan laju air hingga 111,75 meter kubik per detik. "Keduanya menunda waktu kedatangan air sampai Pintu Air Manggarai, Jakarta, sebanyak 11,9 persen atau setara 2 hingga 3 jam," ujar dia.

MAHFUZULLOH AL MURTADHO (BOGOR) | REZA MAULANA

Judul	Bekasi Dapat Rp 4 Triliun untuk Benahi Kali	Tanggal	Kamis, 10 Januari 2020
Media	Koran Tempo, Hal. 6		
Resume	Untuk restorasi kali di Kota Bekasi		

PERISTIWA

Bekasi Dapat Rp 4 Triliun untuk Benahi Kali

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyiapkan dana Rp 4 triliun untuk restorasi Kali Bekasi di Kota Bekasi, Jawa Barat.

EDISI 9 JANUARI 2020



JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyiapkan dana Rp 4 triliun untuk restorasi Kali Bekasi di Kota Bekasi, Jawa Barat. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pengendalian banjir jangka panjang.

Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mengatakan dana besar itu akan mereka gunakan untuk membenahi sungai yang membelah kota sepanjang 15 kilometer tersebut. "Mengembalikan lebar sungai yang dulu, 40 meter. Sekarang cuma 12 sampai 15 meter," kata dia, kemarin.

Tri mengatakan banjir besar awal tahun ini membuat kerusakan di 89 titik tanggul Kali Bekasi. Bahkan ada yang jebol. Akibatnya, permukiman penduduk di bantaran sungai, dari Jatiasih sampai Bekasi Utara, terendam.

ADI WARSONO

BERITA TERKAIT

Polisi Lepas Pegiat Kebebasan Beragama Sudarto

Keluarga Terima Vonis Reynhard

Bom Mobil Meledak di Somalia, Empat Tewas

Pesawat Ukraina Jatuh di Dekat Iran, 176 Orang Tewas

Judul	Kala Dewa Indra Turun ke Ibu Kota	Tanggal	Jumat, 11 Januari 2020
Media	Bisnis Indonesia, Hal. 6		
Resume	Musibah banjir melanda Jakarta		

► MUSIBAH BANJIR JAKARTA

Kala Dewa Indra Turun ke Ibu Kota

Indra, Sang Dewa Hujan, Dewa Petir dan Cuaca, seakan turun ke Jakarta pada malam pergantian tahun 2019 ke 2020. Walau akhirnya banjir melanda Ibu Kota, masih ada optimisme dan kabar baik, demi menyambut Indra yang akan berkunjung kembali.

Aziz Rahardyan & Fani Freynctia
redaksi@bisnis.com

Kepala Bidang Diseminasi Informasi Iklim dan Kualitas Udara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Hary Tirta Djatmiko mengonfirmasi bahwa curah hujan pada awal 2020 seakan masih "pemanasan". Puncak musim penghujan wilayah DKI Jakarta diproyeksi baru berlangsung pada Februari 2020. Padahal, menilai pengukuran BMKG, curah hujan yang mengakibatkan banjir di 390 rukun warga (RW) dengan luasan total kawasan terdampak 156 kilometer persegi ini tercatat dahsyat, bahkan mencapai rekor "Curah hujan 377 mm per hari di [kawasan] Halim Perdanakusuma merupakan rekor baru curah hujan tertinggi sepanjang ada pencatatan hujan di Jakarta dan sekitarnya, sejak pengukuran pertama kali dilakukan tahun 1866 pada zaman kolonial Belanda," ungkapnya kepada *Bisnis*, Kamis (9/1).

Selain rekor curah hujan di kawasan Bandara Halim Perdanakusuma, wilayah yang juga diguyur intensitas hujan tinggi tercatat berada di kawasan lain seperti Taman Mini Indonesia Indah (TMII).

BMKG menganalisis bahwa kejadian banjir besar di Jakarta pada masa lalu, misalnya yang terjadi pada 1918, 1979, 1996, 2002, 2007, 2013, 2014, dan 2015, memang dapat dikaitkan dengan kejadian curah hujan ekstrem dalam 1 hari hingga 2 hari dan

Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan (PMK).

Menurut Anies, informasi BMKG harus disebarluaskan bahkan jika perlu diviralkan kepada masyarakat. Dia juga sudah meminta jajarannya mengantisipasi semua kemungkinan buruk yang bakal terjadi.

"Dan seluruh jajaran kita merespons itu. Kami ada satu jalur komunikasi khusus dari BMKG ke BPBD [Badan Penanggulangan Bencana Daerah]. Nanti BPBD disebarkan kepada seluruh SKPD terkait," imbuhnya.

Anies memastikan seluruh SKPD dari tingkat pusat ke kelurahan sudah mengantisipasi peningkatan permukaan air laut sejak beberapa hari lalu.

Dia menambahkan keberadaan pompa *mobile* di sekitar pesisir untuk membantu bila ternyata muncul rob (air pasang) sehingga bisa dialirkan. Begitu juga dengan antisipasi hujan deras seperti banjir 1 Januari 2020.

"Antisipasinya, kami bangun pos-pos sampai di level kelurahan. Ada sumber daya manusia yang langsung merespons bila di kelurahan itu mulai terjadi genangan, sehingga baru fase genangan sudah langsung direspons," jelas Anies.

Kepala BPBD Provinsi DKI Jakarta Subejo mengimbau masyarakat waspada adanya potensi banjir dalam waktu terdekat, yakni mulai 9 Januari 2020 hingga 12 Januari 2020 akibat potensi hujan bersamaan dengan periode pasang air laut.

"Agar tetap waspada dan hati-hati terhadap dampak yang dapat ditimbulkan, seperti angin kencang, genangan, banjir, tanah



Perbandingan Dampak Banjir Besar di DKI Jakarta

Sumber: Pengantar
DKI Jakarta, diteliti
Felix Wulahan Azam
BISNIS/IRI UTOMO

Tahun	Curah Hujan Tertinggi (mm/hari)	RW Tergenang (unit)	Area Tergenang (km ²)	Jumlah Pengungsi (orang)	Korban Meninggal (jiwa)	Waktu Surut (hari)
2020	377	390	156	31.232	19	4
2015	277	702	281	45.813	5	7
2013	100	599	240	90.913	40	7
2007	340	955	455	276.333	48	10
2002	168	353	168	154.270	32	6



Wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya sejak zaman dulu memang rentan terkena banjir. Catatan yang ada, banjir besar pernah melanda wilayah Batavia sejak 1692. Semua itu terjadi karena Batavia yang kini bernama Jakarta merupakan dataran rendah dengan banyak area berada di bawah permukaan laut. Dengan kondisi itu, DKI Jakarta langganan banjir.

Judul	Permintaan Lahan Diprediksi Naik	Tanggal	Jumat, 11 Januari 2020
Media	Kompas, Hal 13		
Resume	Permintaan lahan untuk industri pada 2020 diperkirakan akan meningkat naik		

KAWASAN INDUSTRI

Permintaan Lahan Diprediksi Naik

JAKARTA, KOMPAS — Permintaan lahan di kawasan industri diperkirakan naik pada 2020. Investor yang sempat menahan diri karena menunggu kondisi politik mulai merealisasikan investasinya.

Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Sanny Iskandar menyatakan, tren permintaan lahan di kawasan industri di Jabodetabek meningkat. Tahun lalu, serapan kawasan industri di Jabodetabek dan Karawang mencapai 400 hektar, naik 122 persen dibandingkan pada 2018 yang 180 hektar.

Lonjakan permintaan terutama terjadi pada triwulan IV-2019 oleh industri barang kebutuhan sehari-hari, logistik, dan pusat data. "Investor berani mengambil keputusan untuk investasi antara lain didorong kebijakan pemerintah yang berlanjut terkait infrastruktur, kemudahan berusaha, dan pengembangan sumber daya manusia," kata Sanny di Jakarta, Kamis (9/1/2019).

Peningkatan penyerapan kawasan industri diprediksi berlanjut pada tahun ini seiring dengan komitmen pemerintah atas 5 program prioritas, yakni pengembangan sumber daya manusia, reformasi birokrasi,

pembangunan infrastruktur, reformasi ekonomi, dan penyerahan regulasi.

Senior Associate Director Colliers International Indonesia, Ferry Salanto menambahkan, anjang-anganc ekspansi perusahaan ke kawasan industri sudah terlihat sejak akhir 2018. Namun, sebagian pelaku cenderung menunda investasi sambil menunggu Pilpres 2019.

Permintaan lahan terutama datang dari pelaku industri yang melakukan ekspansi bisnis. Mayoritas industri yang berekspansi berkaitan dengan konsumsi lokal, seperti industri makanan dan minuman, barang kebutuhan sehari-hari, logistik, kimia dasar, dan otomotif.

Lokasi bergeser

Ferry menambahkan, keterbatasan lahan di kawasan industri mendorong pengembangan kawasan-kawasan industri baru bergeser ke arah timur Jakarta, seperti Patimban (Subang) serta Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pengembangan itu ditunjang akses jalan tol yang memudahkan jalur distribusi. Tantangannya, belum banyak kawasan industri baru yang siap dengan infrastruktur pendukung.

Langkah pengembangan kawasan industri antara lain dilakukan pengembang properti PT Intiland Development Tbk. Perseroan berencana memulai proyek baru kawasan industri seluas 287 hektar di Jawa Tengah mulai triwulan II-2020. Selain itu, pengembangan kawasan industri di Ngoro Industrial Park, Jawa Timur.

Direktur Pengelolaan Modal dan Investasi Intiland Archied Noto Pradono menyatakan, pengembangan kawasan industri di luar Jabodetabek antara lain ditunjang oleh akses yang bagus. Prospek kawasan industri di Indonesia dinilai sangat baik dan sejalan target pemerintah meningkatkan investasi asing ke Indonesia.

Proyek baru itu dinilai potensial karena lokasinya strategis, dekat dengan akses tol dan pembangkit tenaga listrik, serta didukung upah tenaga kerja yang lebih kompetitif.

Tahun ini perseroan mengalokasikan belanja modal Rp 1,5 triliun, antara lain untuk membiayai konstruksi dan pengembangan proyek baru. Dari jumlah itu, sekitar 20 persen untuk pengembangan proyek residensial tapak dan kawasan industri. (LKT)

Judul	Anies Dukung Program Normalisasi	Tanggal	Jumat, 11 Januari 2020
Media	Media Indonesia, Hal 7		
Resume	Untuk mengantisipasi banjir di Kota Jakarta		

Anies Dukung Program Normalisasi

GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan akhirnya melunak terkait program normalisasi. Ia akan mendukung pembebasan lahan untuk melebar badan kali guna mencegah banjir.

Normalisasi merupakan program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) tepatnya Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC). Namun, untuk pembebasan lahan, proyeknya ditangani Pemprov DKI.

"Nanti kalau appraisal (cek lagi), baru kemudian antara Kementerian PUPR dan warga dilakukan transaksi karena belanja tanah membeli bukan APBD, tapi APBN. yang pele-

baran, netral tuh. Pelebaran sungai. Kita akan lakukan pembayaran. Ini juga kita siapkan dasar hukum supaya kuat," ungkap Anies di Balai Kota, kemarin.

Sebelumnya, program normalisasi yang dijalankan sejak era Gubernur Joko Widodo hingga Basuki Tjahaja Purnama terhenti total saat era Anies karena ia enggan melakukan pembebasan lahan. Anies lebih memilih program naturalisasi.

Anies pun menyebut kini sudah mendukung pelebaran sungai. Ia menjamin akan menjalankan tugas yang menjadi wewenangnya dalam program normalisasi. Dalam menerapkan kewenangannya,

ia tak lupa berkoordinasi dengan BBWSCC.

"Saya juga dengan Pak Basuki (Menteri PUPR Basuki Hadimuljono), semua program akan kita saling *support*, dan beliau juga sampaikan, mana yang naturalisasi kita bantu. Mana yang normalisasi kita bantu. Jadi enggak ada itu yang namanya dikonflikkan di kita," tegasnya.

Kepala BBWSCC Bambang Hidayah menyebut pada 2020 ada 1,2km daerah aliran sungai (DAS) Kali Ciliwung yang ditargetkan untuk dinormalisasi. BBWSCC pun sementara ini menyiapkan anggaran Rp20 miliar untuk melakukan normalisasi.

"Di Pejaten, Jakarta Selatan

ya. Kami harapkan tidak ada yang 'bolong-bolong' pembebasan lahannya. Karena kalau ada lahan yang belum dibebaskan di satu seksi, misalnya, itu merepotkan juga kan," kata Bambang.

Ia pun sudah mengoordinasikan kepada Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI agar mau melakukan pendekatan secara khusus kepada warga apabila menemui kesulitan dalam membebaskan lahan.

Bambang pun menyebut normalisasi yang berdiri sendiri tidak akan bisa menghilangkan banjir seutuhnya. Harus ada kebijakan pendukung seperti dibangunnya dua waduk di Sukabumi yang menjadi hulu Kali Ciliwung. (Put/J-1)

Judul	Warga Natuna Ingin Infrastruktur Andal	Tanggal	Jumat, 11 Januari 2020
Media	Media Indonesia, Hal 8		
Resume	Pengembangan infrastruktur di kawasan Natuna dinilai perlu untuk digiatkan		

Warga Natuna Ingin Infrastruktur Andal

Di tengah konflik di perairan Natuna, warga mengingatkan pemerintah bahwa pembangunan di wilayah yang dikenal sebagai gugusan pulau tujuh itu harus digiatkan. Salah satu yang diidamkan warga Ranai, ibu kota Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, ialah pelabuhan yang memadai untuk nelayan, perdagangan, dan penumpang.

"Pelabuhan yang ada masih terlalu kecil bagi aktivitas warga. Kami ingin ada pelabuhan yang lebih besar di Ranai, lebih dekat dengan keberadaan masyarakat," ungkap Zainuduan, seorang Ketua RW, saat bertemu Plt Gubernur Kepulauan Riau, Isdianto, di Ranai, kemarin.

Saat ini, aktivitas warga Natuna dengan daerah lain dihubungkan dengan Bandara Ranai dan Pelabuhan Laut Selat Lampa. Jika bandara berada di wilayah Ranai, untuk menuju pelabuhan warga harus berkendara dengan memakan waktu hingga 1,5 jam.

Zainuduan menambahkan, pelabuhan besar yang diinginkan warga ialah pelabuhan yang bisa disandari kapal sekelas KM Bukit Raya yang selama ini sudah singgah di dermaga Selat Lampa.

"Agar masyarakat Ranai pada khususnya dan masyarakat Natuna dapat lebih cepat mengakses transportasi yang lebih baik di ibu kota kabupaten."

Dalam dialog itu, Isdianto menyatakan adanya keterbatasan pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi dalam melakukan pembangunan infrastruktur di Natuna. "Kami akan coba sampaikan ke pemerintah pusat sehingga kegiatan besar bisa ditangani mereka."

Sejak era 2010-an, Kabupaten Natuna memiliki total APBD di atas Rp1 triliun, tergolong besar di antara daerah lain. PAD pada daerah ini didominasi dari dana bagi hasil migas yang bisa mencapai 60% dari total APBD.

Namun, mahalanya biaya transportasi

membuat daerah ini belum berkembang maksimal. Perekonomian warga yang bergantung pada sektor pertanian dan perikanan belum banyak terungkit.

Dari Jawa Tengah, ratusan kapal nelayan bersiap diberangkatkan ke Laut Natuna. Mereka sepakat hendak mencari ikan sekaligus menjaga kedaulatan laut Indonesia. "Kami siap berangkat ke Natuna," tegas Ramjani, 29, anak buah kapal di Juwana, Kabupaten Pati.

Kesanggupan serupa juga dilontarkan Riswanto, Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kota Tegal. "Kami siap diberangkatkan."

Sementara itu, pengamat kelautan dan perikanan Bambang Haryo Soekartono meminta pemerintah Indonesia segera membentuk Sea and Coast Guard. "Badan ini adalah penjaga dan penegak peraturan di laut dan pantai yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden." (HK/AS/JI/WB/N-2)